

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada tahun 2010-2014, oleh karena itu pada tahun 2011 melalui APBN-P (pemanfaatan dana penghematan) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melaksanakan kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) dengan kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/ bantuan sosial kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Direktorat Jendral Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DITJENBPDAS, 2013).

Kegiatan bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi (BLM-PPMPBK) pada dasarnya merupakan kegiatan usaha tani konservasi berupa penanaman wanatani (*agroforestry*) yang dapat dilengkapi dengan pembuatan/ pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, serta aneka usaha kehutanan bangunan konservasi tanah dan air, serta aneka usaha kehutanan berupa pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan bantuan komoditi perternakan/ perikanan. Kegiatan wanatani antara lain penanaman pohon berkayu yang dipadukan dengan: hijauan pakan

ternak (*silvopasture*) dan tanaman bawah tegakan/ tanaman pertanian. Pembuatan atau pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air antara lain teras bangku/ kredit/ guludan, saluran pembuangan air dan terjunan air, sumur resapan dan pengendali jurang (*gully plug*).

Pengembangan komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara lain lebah madu, sutera alam, bambu, rotan, nyamplung dan gaharu. Tujuan dari kegiatan bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi ini adalah untuk memperbaiki kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan kelompok masyarakat melalui kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi dan memberdayakan kelompok masyarakat dalam aneka usaha perhutanan berbasis konservasi baik kelembagaan maupun kemampuan usaha, sedangkan sasaran dan besarnya bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi ini adalah kelompok masyarakat di desa yang terdapat lahan tidak produktif dan besarnya bantuan yang diberikan untuk kelompok tani yang terpilih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff seksi program DAS mengatakan anggaran yang di sediakan setiap tahunnya tidak ditentukan atau anggarannya tidak menetap akan tetapi anggaran dari pusat yang nantinya akan dicairkan sesuai kelompok tani masyarakat pedesaan yang dinyatakan layak atau berhak mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat Pedesaan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK) ini sehingga itu untuk anggaran dari program BLM-PPMPBK

ini tidak ada batasannya untuk tiap tahunnya tetapi anggaran disesuaikan dengan kelompok tani masyarakat pedesaan yang dinyatakan layak atau berhak mendapatkan bantuan tersebut di tiap tahunnya.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok tani masyarakat pedesaan yang terpilih dan telah lulus kelayakan sebagai penerima bantuan serta berdasar pada kriteria yang telah ditentukan oleh pihak kantor Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. Pemberian bantuan ini dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2011 hingga sekarang. Adapun sumber dana didapatkan dari APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan).

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu staf BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung) Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam penyeleksian kelompok tani masyarakat pedesaan yang layak mendapatkan bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan (BLM-PPMPBK) masih dengan cara memeriksa kelengkapan berkas satu persatu, mengecek dan menghitung perolehan nilai yang didapatkan sehingga memakan banyak waktu untuk menetapkan kelompok tani yang layak menerima bantuan. Berikut daftar penerima bantuan langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan:

Tabel 1.1. Daftar Penerima Bantuan BLM-PPMPBK

No.	Periode	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Penerima
1.	2013	24	13
2.	2014	32	8
3.	2015	36	10
4.	2016	40	4

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2013.

Dari tabel diatas, terlihat jumlah kelompok tani masyarakat pedesaan dalam tiap tahunnya semakin bertambah, sementara yang mendapatkan kuota bantuan hanya terbatas sehingganya hal inilah yang menjadi permasalahan bagi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses penyeleksian yang benar-benar harus di perketat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hal lain juga adalah banyaknya kriteria yang harus dibandingkan dengan kriteria lainnya untuk mendapatkan kelompok tani yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan pemberian bantuan diantaranya: Lokasi Desa, Kategori Desa, Jumlah anggota kelompok masyarakat, luas lahan, dan kesesuaian anggaran yang diusulkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini dipilih karena pada proses penentuan bobotnya tidak dilakukan secara langsung berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan melainkan proses penentuan pembobotan dilakukan dengan melalui perbandingan antara kriteria satu dengan kriteria lainnya sehingga didapatkan

hasil pembobotan yang akurat karena berdasar pada proses perhitungan metode (*Analytical Hierarchy Process*) AHP.

Metode ini juga merupakan salah satu metode dalam proses pengambilan keputusan karena peralatan utamanya adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan menggunakan hierarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompok–kelompoknya. Kemudian kelompok–kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Sesuai dengan prinsip dasar AHP yakni setelah dibuat hierarki dilakukan penilaian kriteria dan alternatif dengan menggunakan matriks perbandingan berpasangan, kemudian ditentukan prioritas dimana bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika, kemudian dihitung rasio konsistensinya, jika nilai rasio konsistensinya $\leq 10\%$, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. (Kusrini, 2007).

Untuk itu penulis mengambil judul **“Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah kelompok tani masyarakat pedesaan yang memasukkan proposal permintaan bantuan sementara kuota bantuan jumlahnya terbatas.
2. Belum adanya suatu sistem pendukung keputusan yang di gunakan oleh pihak Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam menentukan Penerima Bantuan Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK).
3. Banyaknya kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penentuan penerima bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan sehingga membutuhkan suatu sistem dalam tahapan penyeleksiannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merencanakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* ?
2. Bagaimana hasil penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* terhadap Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat

Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dengan menggunakan Metode *Analychal Hierachy Process* pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merekayasa Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi .
2. Menerapkan hasil dari metode *Analychal Hierachy Process* dalam membangun Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi komputer pada umumnya dan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode *Analychal Hierachy Process* khususnya.

2. Praktisi.

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penentuan pengambilan keputusan khususnya tentang Pemilihan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

3. Peneliti.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi bagi mereka tentang masalah yang diteliti untuk menerapkannya dalam sistem yang lebih luas dan lebih kompleks.